

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip “*Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*”¹

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologi untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara yaitu “*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Yang Abadi dan Keadilan Sosial.*”²

Terkait dalam mewujudkan tujuan bernegara di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur mengenai kesejahteraan sosial yang berbunyi:

¹ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press, hlm 22

² *Ibid.*, hlm 22

- (1) *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*
- (2) *Negara Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*
- (3) *Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Indonesia sendiri mengacu pada negara sosial atau negara kesejahteraan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Negara kesejahteraan diwujudkan melalui kebijakan sosial, sebagai suatu kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial, kebijakan sosial menunjuk pada seperangkat kewajiban negara *State Obligation* untuk melindungi dan memberi pelayanan dasar bagi warganya, pemenuhan kebutuhan hidup minimum, pendidikan dasar, perawatan kesehatan dasar, perlindungan sosial pada kelompok rentan adalah beberapa contoh kewajiban negara yang harus dipenuhi yang dinyatakan oleh konsep negara kesejahteraan.

Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dimana undang-undang tersebut bermaksud untuk menjelaskan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar,

penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional serta perlindungan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan juga berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 seperti yang tertuang di dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- (b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.*
- (c) Mengembangkan kehidupan demokrasi.*
- (d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.*
- (e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.*

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam pengangkatan kesejahteraan masyarakat, di Indonesia sendiri masalah kemiskinan banyak diperbincangkan karena merupakan masalah sosial yang kronis karena setiap tahun kemiskinan di Indonesia ini tidak juga turun semakin tahun kemiskinan cenderung meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo angka garis kemiskinan setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan, setiap tahunnya garis kemiskinan selalu meningkat di tahun 2008 saja, angka garis kemiskinan sekitar 182.624, di tahun 2009 menjadi 211.928, di tahun

2010 bertambah menjadi 227.005, di tahun 2011 bertambah menjadi 240.711, di tahun 2012 sendiri menjadi 259.184, di tahun 2013 angka garis kemiskinan sebesar 279.400, di tahun 2014 terhitung menjadi 291.494, di tahun 2015 bertambah menjadi 303.030, untuk tahun 2016 sendiri grafik kemiskinan bertambah secara signifikan sebesar 327.217.³

Sedangkan di Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sendiri tingkat garis kemiskinan mencapai 834 KK ini terjadi didasarkan banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai ketidaktetapan pekerjaan seperti buruh, petani, serta masih banyaknya pengangguran di Desa Cangkol. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka seharusnya pemerintah desa harus bisa menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Pemerintah Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di Desa Cangkol?
2. Bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan kemiskinan?

³Indeks Kedalaman Kemiskinan& Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo https://sukoharjokab.bps.go.id/link_tabel statis/view /id/4 diunduh pada 24 Februari 2017 pukul 20.00 WIB

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang akan di capai dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan di Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- b. Mengetahui tindakan yang akan dilakukan Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

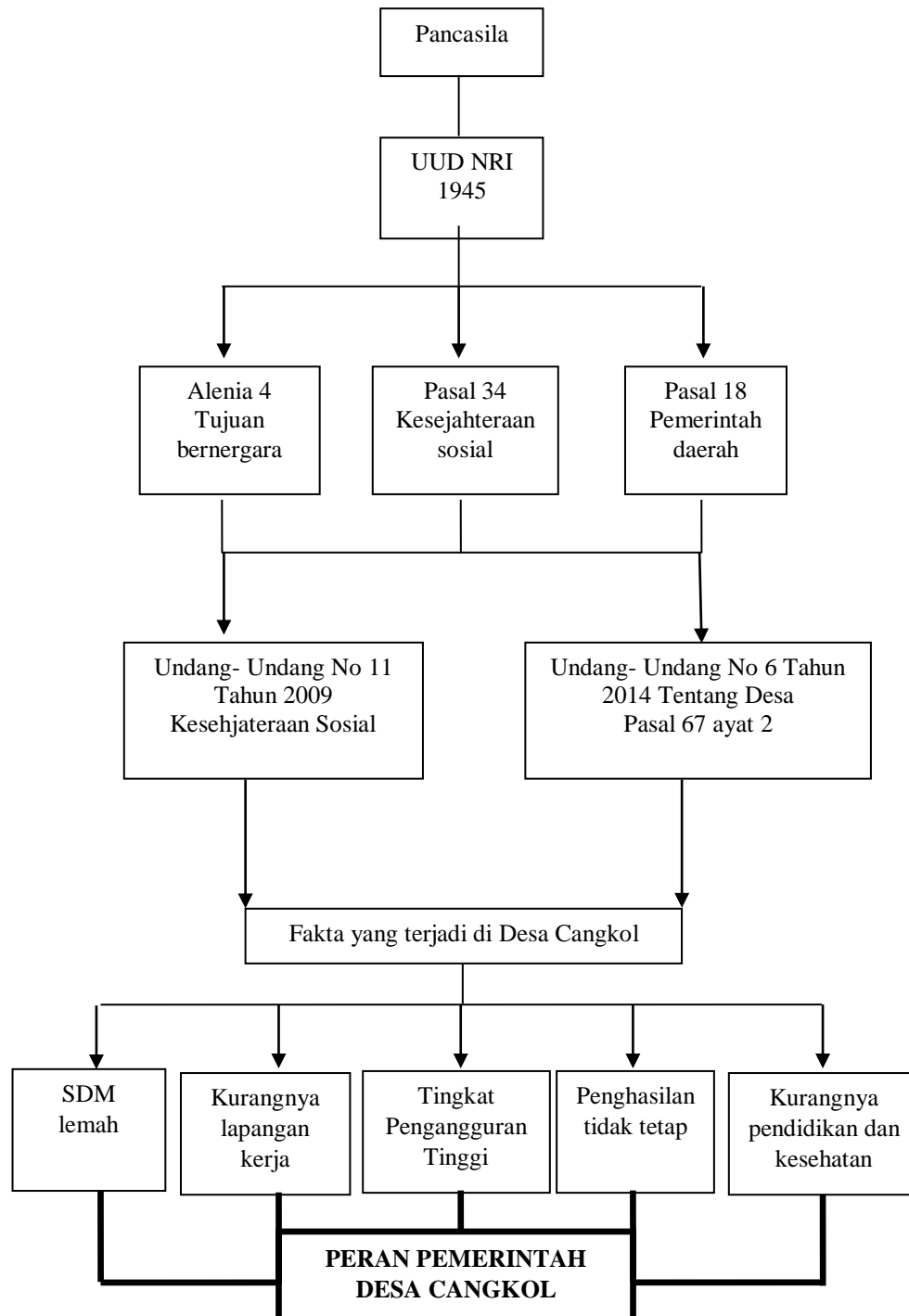
a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan masalah kemiskinan.
- 2) Penelitian ini semoga dapat dijadikan sebuah referensi untuk penelitian lainnya.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini semoga bisa menjadi tambahan sebuah pemikiran dalam permasalahan yang terjadi terkait mengenai penanggulangan kemiskinan.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan landasan filosofis yang berarti lima prinsip untuk mencapai empat tujuan bernegara sebagaimana menjadi bagian pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni untuk *“memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

Untuk mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan oleh Pancasila, maka di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur mengenai kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Pasal 34 bahwa negara mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat dan melindungi masyarakatnya.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia berupaya senantiasa menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat sebab hakikatnya negara ini ada di tangan rakyat.

Perlindungan negara terhadap masyarakatnya kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam undang-undang ini peranan negara sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial bagi masyarakat, memulihkan fungsi sosial dalam rangka untuk mencapai kemandirian.

Dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pembentukan pemerintah daerah bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat pemerintahan sendiri agar bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, mensejahterakan masyarakat dan bisa mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri, dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan umum dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat selain itu pemerintah desa diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan desa, mensejahterakan masyarakatnya.

Era globalisasi ini masalah kesejahteraan masyarakat semakin mengkhawatirkan kesenjangan pembangunan ekonomi yang tidak merata banyak membuat masyarakat yang mengalami masalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang menimbulkan masalah kemiskinan, kemiskinan di desa diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu lemahnya sumber daya manusia, kekurangan lapangan pekerjaan, kurang pekanya pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Husodo Negara Kesejahteraan ialah suatu negara dimana bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya⁴

⁴ Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, dan Abdussalam, Masduki, 2015, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publising, hlm 60

Kondisi masyarakat Desa Cangkol yang masih berada dalam garis kemiskinan mencakup masyarakat yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap, tidak berpendapatan, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, masih banyak pengangguran itulah yang menyebabkan faktor kemiskinan di Desa Cangkol. Dengan demikian peran pemerintah Desa Cangkol sangat diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan agar dapat mengangkat masyarakat menjadi lebih baik lagi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵ Sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam agar permasalahan yang diteliti dapat digambarkan lebih jelas.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.⁶

⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.24

⁶Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15

Pendekatan empiris berfungsi untuk menganalisis tentang permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pemerintah Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo karena merasa tertarik dengan permasalahan kemiskinan yang masih terjadi di Desa Cangkol, selain itu lokasinya strategis untuk penelitian.

4. Sumber Data

Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dasar, atau data asli yang diperoleh langsung dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan belum diuraikan orang lain.⁷ Data Primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Cangkol.

b. Data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya.⁸ Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa:

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm 65

⁸Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, dan bahan hukum primer biasanya berasal dari suatu peraturan perundang-undangan.⁹ Yang diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c) Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya¹⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.¹¹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm, 181

¹⁰ Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 116

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia, hlm

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan yaitu pihak dari Pemerintah Desa Cangkol untuk memperoleh data primer, dan menggunakan suatu studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai adalah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak harus dilakukan dengan lokasi yang luas, dengan responden yang banyak, dan dengan keterangan yang banyak. Sementara itu, walaupun lokasinya terbatas, responden sedikit, jika data yang didapat merupakan kenyataan yang berlaku, maka data tersebut cukup membuktikan kebenarannya.¹³

Dalam pengambilan kesimpulan maka penulis menggunakan metode induktif. Metode ini merupakan metode penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum seperti suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat ditarik ke dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin., *Op.Cit*, hlm 67

¹³Hilman Hadiksuma, *Op.Cit*, hlm 99

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc.cit*, hlm 68

F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan dalam pembahasan, analisa serta penjabaran isi penelitian ini maka sistematika skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yakni:

Bab I adalah Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data serta Sistematika Skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, berisi mengenai Tinjauan Umum Mengenai Negara Hukum, Tinjauan Umum Negara Kesejahteraan, Tinjauan Umum Pemerintah Desa, dan Tinjauan Umum Kemiskinan.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di Desa Cangkol dan Bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan kemiskinan.

Bab IV adalah Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.